

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan (Irawati dan Fakhruddin 2016). Laporan keuangan yang berintegritas harus memenuhi dua karakteristik utama laporan keuangan yaitu relevan dan keandalan. Informasi keuangan yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi bergantung pada informasi tersebut. Laporan keuangan merupakan catatan informasi perusahaan yang berisi data-data keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan merupakan media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba ditahan dan laporan posisi keuangan secara singkat adalah hasil akhir proses akuntansi (Agnes Sawir, 2001:2). Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas berbagai sumber daya yang telah dipercayakan pengelolaannya kepada mereka (SAK, 2007 dalam Fajaryani, 2015). Berbagai informasi yang tersedia dalam laporan keuangan diperlukan para pengguna seperti investor,

kreditur, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan yang memiliki konsekuensi ekonomi.

Oleh karena itu dalam laporan keuangan harus memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Integritas laporan keuangan sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar. *International Accounting Standard Board* (IASB) menetapkan dua fundamental *qualities* yang harus dimiliki informasi yang termuat dalam laporan keuangan agar berguna dalam pembuatan keputusan yaitu *relevance* dan *faithful representation* (Fajaryani 2015).

Laporan keuangan yang berintegritas memenuhi kualitas *reliability* yang terdiri dari 3 komponen, yaitu *verifiability*, *representational faithfulness* dan *neutrality*. Integritas informasi laporan keuangan dapat diproksi dengan konservatisme. Konservatisme merupakan sebuah prinsip kehati-hatian dalam mengakui aktiva dan laba oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidak pastian (Wibowo, 2002 dan Gayatri dan saputra, 2013). Konsep konservatisme dalam penggunaannya adalah untuk mengakui, mengukur dan melaporkan nilai aktiva dan pendapatan lebih rendah, dan nilai kewajiban dan beban lebih tinggi.

Implikasi konsep konservatisme terhadap prinsip akuntansi yaitu akuntansi mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar (Suwardjono, 1989). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan alasan penggunaan konservatisme sebagai *proxi* integritas laporan keuangan yaitu,

konservatisme sendiri identik dengan laporan keuangan yang *understate* yang risikonya lebih kecil daripada laporan keuangan yang *overstate*. Jadi laporan keuangan yang memenuhi karakteristik tersebut akan menjadi lebih *reliable* sehingga memenuhi syarat kualitas informasi dalam SFAC No. 2.

Banyak perusahaan menyajikan informasi dalam laporan keuangan dengan tidak adanya integritas, dimana informasi yang disampaikan tidak benar dan tidak adil bagi beberapa pihak pengguna laporan keuangan. Jatuhnya perusahaan raksasa dunia pada awal dekade 2000an akibat dari skandal kasus-kasus hukum manipulasi akuntansi yang melibatkan perusahaan besar karena melakukan tindakan *earning management* telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui. Namun, pada kenyataannya mewujudkan integritas laporan keuangan merupakan hal yang berat. Terbukti terjadi beberapa kasus yang membuat keraguan terhadap tingkat integritas laporan keuangan.

Kasus manipulasi akuntansi ini melibatkan sejumlah perusahaan besar di Amerika seperti *Enron, Xerox, Tyco, Global Crossing* dan *Worldcom* maupun beberapa perusahaan di Indonesia seperti Kimia Farma dan Bank Lippo yang dulunya mempunyai kualitas audit yang tinggi. Salah satu skandal yang melakukan manipulasi laporan keuangan adalah PT. Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 miliar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa.

Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 miliar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa *overstated* persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan *overstated* penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan.

PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (*master prices*) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 61 Peraturan

Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 jo Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maka PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Timbulnya berbagai kasus kecurangan akuntansi ini lebih berkaitan dengan masalah integritas laporan keuangan, artinya informasi yang ada dalam laporan keuangan tidak disajikan dengan keadaan yang sebenarnya. Terungkapnya skandal-skandal sejenis ini menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat keuangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sehingga tidak mampu mencegah penyajian laporan keuangan dengan integritas yang rendah (Fajaryani, 2015).

Setiap perusahaan harus memiliki tata kelola perusahaan yang baik atau yang biasa disebut dengan *good corporate governance*. Menurut Siallagan dan Machfoedz (2006), *corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan, misalnya *shareholders* dan *bondholders* dari perusahaan memperoleh pengembalian dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan kontrol terhadap manajer.

Penerapan *corporate governance* didasarkan pada teori agensi. Teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan

memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi nyata perusahaan. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (Haris, 2004 dalam Alditama, 2009). *Corporate Governance* (GCG) adalah salah satu cara untuk mengendalikan tindakan oportunistik yang dilakukan pihak manajemen.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) ada lima asas good corporate governance (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Setiap perusahaan diharapkan mampu untuk memastikan penerapan asas GCG di setiap aspek bisnis serta di seluruh jajaran perusahaan. Penelitian ini meneliti pengaruh corporate governance yang diproksi dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit.

Kepemilikan *institusional* yaitu saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi yang meliputi perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi atau kepemilikan institusi lainnya. Keberadaan saham institusi akan mampu meningkatkan pengawasan kinerja manajemen. Penelitian yang dilakukan Fajaryani (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Serta penelitian yang dilakukan Dewi dan Putra, (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil yang bertentangan diperoleh Latifah (2015) menurut hasil penelitiannya kepemilikan institusional berpengaruh negatif

terhadap integritas laporan keuangan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen atau pihak internal perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen diharapkan akan mampu menyelaraskan berbagai kepentingan dalam perusahaan. Pengawasan terhadap kinerja manajemen merupakan salah satu cara untuk memastikan penerapan asas *corporate governance*.

Keberadaan pemegang saham institusional didukung dengan keberadaan komisaris independen. Penelitian yang dilakukan Dewi dan Putra (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Serta penelitian yang dilakukan Hamid dan Solikah (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hasil yang bertentangan diperoleh Gayatri dan Saputra (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Serta penelitian yang dilakukan Andry (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.

Komisaris independen berfokus pada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham dari praktik curang. Pedoman umum *Good Corporate Governance* (GCG) (2006) menyebutkan komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.

Penelitian yang dilakukan Nicolin dan Arifin (2013) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Serta penelitian dari Dewi dan Putra (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian yang bertentangan diperoleh Rahiim dan Wulandari (2014) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Peran komite audit sangat diperlukan guna melindungi pemegang saham dari praktik curang. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor akan dapat mengurangi resiko investasi. Tugas komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris guna memastikan laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penelitian yang dilakukan Dewi dan Putra (2016) komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda diperoleh Pancawati (2010) komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Serta penelitian dari Hamid dan Solikah (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan.

Ukuran perusahaan merupakan rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun berikutnya. Perusahaan dengan ukuran besar diasumsikan dengan jumlah aktiva dan tingkat pendapatan yang besar sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. Perusahaan berskala kecil dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar cenderung kurang menguntungkan.

Faktor-faktor pendukung yang dimiliki perusahaan kecil untuk memproduksi barang berjumlah terbatas. Menurut penelitian Fajaryani (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta penelitian yang dilakukan Rizkita dan Leny (2015), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian yang berbeda diperoleh Rimi (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan, mendapatkan kesimpulan yang berbeda-beda dari hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji kembali pengaruh mekanisme *corporate governance*, dan ukuran perusahaan, terhadap integritas laporan keuangan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut:

- 1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
- 2) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

- 3) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
- 4) Apakah komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
- 5) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan
- 2) Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan
- 3) Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan
- 4) Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan
- 5) Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis melalui penelitian ini mencoba memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan.

Serta dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik bagi seluruh mahasiswa sebagai pengetahuan tambahan dan bahan masukan, disamping itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan sumber bacaan dan informasi mengenai integritas laporan keuangan.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan penerapan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu aspek yang sangat penting terutama dalam menjalankan operasi perusahaan. Menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik diyakini mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan *corporate value* dan kepercayaan investor.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menurut Sugiyono (2017:81) teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Konsep merupakan pendapat ringkas yang dibentuk melalui proses penyimpulan umum dari suatu peristiwa berdasarkan hasil observasi yang relevan. Definisi merupakan suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal dan biasanya lebih kompleks dari arti, makna atau pengertian suatu hal. Sedangkan proporsi merupakan pernyataan yang membenarkan atau menolak suatu kejadian.

2.1.1 Agency Theory

Agency Theory menjelaskan tentang (kontrak) hubungan antara dua pihak yaitu *principal* (investor) dan agen (manajer). Jensen dan Meckling (1976) dalam Wardila (2013), menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu didefinisikan sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yang disebut agen, untuk dapat bertindak atas nama agen tersebut. Teori keagenan mengatakan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham sehingga diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Saleh (2004) menyatakan bahwa informasi laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat waktu akan mengurangi asimetri informasi yang erat kaitannya dengan *agency theory*. Perkembangan perusahaan yang semakin besar

memungkinkan terjadi konflik antara prinsipal yaitu para pemegang saham (investor) dan pihak agent yang diwakili oleh manajemen (direksi). Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu oleh prinsipal serta mempunyai tanggung jawab memaksimalkan kemakmuran prinsipal. Sementara prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dapat menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Oleh karena itu dibutuhkan pihak ketiga yang independen dalam hal ini adalah akuntan publik untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan (Susiana dan Herawaty, 2007 dalam Srimindarti dan Elen 2014).

Wijayanti (2009) menggunakan asumsi sifat dasar manusia untuk menjelaskan teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak oportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Manajer mempunyai kewajiban untuk memberikan pengungkapan informasi melalui laporan keuangan.

2.1.2 Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki integritas dalam penyajiannya. Penyajian laporan keuangan yang memiliki integritas akan melindungi hak-hak stakeholder, karena mereka bisa mengetahui

keadaan perusahaan yang sebenarnya bukan laporan keuangan yang telah dimanipulasi dan menyesatkan. Selain itu, laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi juga membantu mereka mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan investasi (Herlin, 2009). Laporan keuangan dikatakan memiliki integritas bila laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip dan syarat kualitas laporan keuangan. Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur (Mayangsari dalam Herawaty, 2007).

Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan (Irawati dan Fakhrudin, 2016). Laporan keuangan yang berintegritas harus memenuhi dua karakteristik utama laporan keuangan yaitu relevan dan keandalan. Informasi keuangan yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi bergantung pada informasi tersebut.

Dalam penelitian ini, integritas laporan keuangan diproksikan dengan konservatisme. Konservatisme adalah sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan yang terjelek dari ketidakpastian tersebut (Suwardjono, 2010:245). Prinsip konservatisme seringkali melakukan penundaan pengakuan kabar baik (*good news*) pada laporan keuangan, namun secepatnya mengakui kabar kurang baik (*bad news*) (Subramanyam dan Wild, 2010:91).

2.1.3 *Corporate Governance*

1) *Definisi Corporate Governance*

Corporate Governance menurut *Cadbury Committee of United Kingdom (1922)*: ”Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”. Muh. Effendi (2009) dalam bukunya *The Power of Good Corporate Governance*, pengertian GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. FCGI (2002) menjelaskan, bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja. Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate*

governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri, menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana kapital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. *Corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*). Dari pendapat pakar di atas dapat dikatakan bahwa *good corporate governance* (GCG) adalah seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan *stakeholders* di suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan peningkatan pada kualitas GCG menunjukkan peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas GCG, cenderung menunjukkan penurunan pada penilaian pasar (Cheung, 2011).

2) Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip dasar *good corporate governance* sebagaimana yang tertuang dalam pedoman *good corporate governance* yang dipublikasikan oleh *National Committee on Governance* pada tahun 2006 adalah sebagai berikut:

a) Transparansi (*Transparency*)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) *Responsibilitas (Responsibility)* Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) *Independensi (Independency)*

Pelaksanaan asas *good corporate governance* (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

4.) *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

3) Tujuan *Corporate Governance*

Tujuan *good corporate governance* menurut Sutojo (2008) adalah sebagai berikut:

- a) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- b) Melindungi hak dan kepentingan pemegang kepentingan *non*-pemegang saham.
- c) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- d) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan.
- e) Meningkatkan mutu hubungan dewan pengurus dengan manajemen senior perusahaan.

Selain menurut Siswanto Sutojo, tujuan *good corporate governance* juga dikemukakan oleh Tunggal (2011:34). Tujuan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

- a) Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.
- b) Aktiva perusahaan terjaga dengan baik.
- c) Perusahaan menjalankan bisnis dengan praktik yang sehat.
- d) Kegiatan perusahaan dilakukan dengan transparan.

4) Manfaat *Corporate Governance*

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya *corporate governance* berdasarkan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2001), antara lain :

- a) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

5) **Mekanisme Corporate Governance**

Menurut Agrawal (2001) menjelaskan bahwa pembagian mekanisme pengendali *corporate governance* menjadi dua, eksternal dan internal. Mekanisme eksternal dijelaskan melalui *outsiders*, di mana hal ini termasuk pemegang saham institusional, *outside block holdings*, dan kegiatan *take over*. Mekanisme pengendalian eksternal tidak hanya pasar modal saja, tetapi juga perbankan sebagai penyuntik dana, masyarakat sebagai konsumen, *supplier*, tenaga kerja, pemerintah sebagai regulator, serta *stakeholder* lainnya. Mekanisme pengendalian internal yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan adalah dewan komisaris saja beserta komite-komite bawahnya, anggota dari dewan komisaris dan karakteristiknya

seperti ukuran dewan komisaris, jumlah dari dewan komisaris yang independen (dari luar perusahaan), komite remunerasi, pembiayaan utang. Menurut Jensen (2000), tujuan utama dari sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan peringatan awal, mengembalikan organisasi sebelum mencapai tingkat kritis. Dewan komisaris dalam hal ini merupakan pihak sebagai penanggungjawab final dalam fungsi perusahaan. Sistem *corporate governance* sangat kompleks dan terintegrasi sehingga diperlukan suatu mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol pada *corporate governance* dirancang untuk mengurangi ketidak efisienan kinerja manajemen perusahaan yang timbul karena *moral hazard*, kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan.

a) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya pada akhir periode atau akhir taun (Shien et al. dalam Istiantoro et al., 2017). Makna lain dari kepemilikan institusional adalah persentase jumlah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, berupa lembaga asuransi perbankan, perusahaan investasi, aset manajemen, dan kepemilikan institusi lainnya (Susiana dan Herawati, 2007). Kepemilikan institusional dinilai memegang peranan penting dalam meminimalisir adanya konflik yang terjadi antara manajemen dengan pemilik saham (konflik keagenan). Hal ini dikarenakan, investor institusional terlibat langsung dalam pengambilan suatu keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Keberadaan investor ini, mengurangi

adanya tingkat manipulasi yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen dalam mencapai kepentingannya sendiri. Sehingga kepentingan pemilik saham tidak akan diabaikan oleh manajemen, sebab investor institusional akan melakukan monitoring atas kinerja manajemen. Monitoring yang dilakukan oleh pihak institusional, akan menjamin kemakmuran pemilik saham. Kepemilikan saham institusional memiliki kelebihan, yaitu profesional dalam melakukan analisis atas informasi yang diperoleh. Sehingga, pihak institusional dapat melakukan uji atas keandalan informasi dan memiliki motivasi yang tinggi dalam melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional perusahaan (Astinia, 2013).

b) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase dari seluruh saham yang dimiliki pihak manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007). Makna lain mengenai kepemilikan manajerial, yaitu kepemilikan saham oleh manajemen yang juga bekerja sebagai pengelola suatu perusahaan (Dewi dan Putra, 2016). Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang digunakan dengan tujuan agar pihak pengelola perusahaan (manajemen) bekerja sesuai dengan kepentingan pemilik saham (Akram et al., 2017). Adanya kepemilikan manajerial membuat kedudukan antara manajemen dan pemilik saham menjadi sejajar, sehingga manajemen sebagai pengelola perusahaan akan memberikan kinerja terbaik untuk memenuhi kepentingan pemilik saham, yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jensen dan

Meckling dalam Akram et al (2017), dimana kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan dua kepentingan, yaitu kepentingan pemilik saham dan kepentingan manajemen. Manajemen yang sekaligus menjadi pemilik saham tidak hanya bekerja untuk meningkatkan nilai perusahaan, namun juga akan meningkatkan integritas laporan keuangan. Semakin tinggi saham yang dimiliki manajemen, maka semakin luas kekuasaan manajer dalam memilih dan mengatur berbagai kebijakan akuntansi yang tepat untuk perusahaan tersebut. Untuk mencapai kepentingan pemilik saham, manajemen tidak akan berlaku sesuai dengan keinginannya, sebab dirinya merupakan bagian dari pemilik saham yang akan terkena dampak dari kinerja yang telah dilakukannya. Sehingga, pihak manajemen tidak akan melakukan manipulasi laporan keuangan, yang biasanya dilakukan agar pemilik saham merasa puas atas kinerja yang telah diberikan.

c) Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan suatu badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan (Emirzon, 2007). Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Hal ini dikarenakan kegagalan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengendaliannya terhadap pihak dewan direksi dan manajemen dengan baik. Adanya keberadaan komisaris independen pada

suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen karena terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak eksternal diluar manajemen perusahaan.

d) Komite Audit

Komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk melakukan audit atas kegiatan operasional dan melakukan pemilihan serta penilaian atas kinerja perusahaan kantor akuntan publik (Susiana dan Herawaty, 2007). Komite audit dapat didefinisikan sebagai suatu komite yang dibentuk oleh dewan komite untuk bekerja secara profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas, memperkuat posisi dewan komisaris, melaksanakan audit dan implementasi dari *corporate governance* pada suatu perusahaan (Ikatan Komite Audit Indonesia dalam Putri dan Supriati, 2020). Keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-317/BEJ/16/2000 menyatakan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, dimana anggotanya dipilih dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan pada hal-hal yang dianggap perlu atas pelaksanaan ungsi direksi dalam mengelola perusahaan. Komite audit memiliki fungsi untuk memberikan pandangan mengenai berbagai masalah yang timbul yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Akram et al., 2017). Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) orang, dimana satu diantaranya meruakan komisaris independen yang menjabat sebagai ketua

komite audit, sedang anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen dan satu diantaranya harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/atau keuangan (Wardhani et al., 2010). Dalam hal laporan keuangan, komite audit bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan yang berlaku, melakukan pemeriksaan ulang terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memastikan tidak terdapat salah saji yang bernilai material, dan menilai mutu pelayanan serta kewajaran atas biaya yang disarankan oleh auditor eksternal (Supriyono dalam Verya, 2017)

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu: Perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan besar yang sahamnya tersebar sangat luas, maka setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya pengendalian dari pihak yang dominan terhadap perusahaan bersangkutan.

Sebaliknya, perusahaan yang kecil, dimana sahamnya tersebar hanya di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya kontrol pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sehingga ketika ukuran perusahaan bertambah besar, kepentingan publik atas penyajian laporan keuangan yang terintegrasi juga semakin tinggi (Gayatri dan Saputra 2013).

Perusahaan dengan ukuran besar diasumsikan dengan jumlah aktiva dan tingkat pendapatan yang besar sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. Perusahaan berskala kecil dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar cenderung kurang menguntungkan (Gayatri dan Saputra 2013).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai Pengaruh mekanisme *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar acuan dalam penelitian ini:

- 1) Pancawati (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance*, independensi auditor dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur dengan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial signifikan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sementara komite audit, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
- 2) Gayatri dan Saputra (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate*

governance, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur dengan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance*, yaitu komisaris independen, komite audit berpengaruh positif dan signifikan, namun kepemilikan institusional tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sementara itu, ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

- 3) Nicolin dan Arifin (2013) melakukan penelitian pengaruh *struktur corporate governance*, audit tenure, dan spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur dengan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian komisaris independen, komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan saham manajerial, kepemilikan institusional dan audit tenure tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan dan spesialisasi industri auditor tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
- 4) Rahiim dan Wulandari (2014), melakukan penelitian .Pengaruh Mekanisme *Corporate Governace* Dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Laporan keuangan pada perusahaan manufaktur dengan teknik analisis linier berganda. Menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan kualitas KAP tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
- 5) Srimindarti dan Elen (2014), melakukan penelitian peran kepemilikan

institusional, komisaris independen, komite audit dan auditor eksternal terhadap integritas laporan keuangan ada perusahaan manufaktur dengan teknik analisis linier berganda. Menunjukkan hasil penelitian yaitu komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan institusional, komite audit dan auditor eksternal tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

- 6) Wulandari dan Budiarta (2014), melakukan penelitian pengaruh struktur kepemilikan, komite audit, komisaris independen dan dewan direksi terhadap integritas laporan keuangan ada perusahaan manufaktur dengan teknik analisis linier berganda. menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajemen, komite audit, dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
- 7) Fajaryani (2015), melakukan penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan pada perusahaan pertambangan dengan teknik analisis linier berganda. Menunjukkan hasil penelitiannya yaitu kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Spesialisasi industri auditor berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan
- 8) Dewi dan Putra (2016), melakukan penelitian pengaruh mekanisme *corporate governance* pada integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur dengan teknik analisis linier berganda menyatakan bahwa kepemilikan

institusional, kepemilikan manajemen, dan komisaris independen berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan. Sedangkan variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

- 9) Verya (2017) melakukan penelitian analisis pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan *good corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur dengan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan Ukuran perusahaan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
- 10) Istiantoro, et al (2017), melakukan penelitian pengaruh struktur *corporate governace* terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan lq45 yang terdaftar di bei. Menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan, kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laporan keuangan, komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
- 11) Silvia, dkk (2018) melakukan penelitian pengaruh struktur *corporate governance* dan audit tenure terhadap integritas laporan keuangan menyatakan komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan dan audit tenure berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan

keuangan.

- 12) Widya dan Yuli (2020) melakukan penelitian pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan pertambangan. Hasil penelitian tersebut menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan variabel kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
- 13) Muhammad (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan. Secara parsial kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap integritas laporan keuangan.
- 14) Fatimah,dkk (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme *corporate governance*, audit tenure, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan bumh yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, audit tenure, ukuran perusahaan, *leverage* berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan beberapa variabel independen yang sama seperti *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksi Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu integritas laporan keuangan. Persamaan juga terdapat pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan padaperusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian ini seperti kualitas KAP, audit tenure, spesialisasi industri auditor, *leverage* dan kualitas audit.

